

**LAPORAN EVALUASI
HASIL RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
TRIWULAN I**



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS KESEHATAN
2023**

KATA PENGANTAR

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun Renja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai langkah nyata penerapan membuat anggaran Dinas Kesehatan.

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan Renja 2023 sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang akan ditetapkan dalam Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 - 2026, yang akan dilaksanakan melalui pelbagai kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan kinerja memerlukan pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan kemungkinan pelaksanaannya.

Didalam rencana kerja ini evaluasi pencapaian program Tahun 2020 dan perkiraan kegiatan Tahun 2023 dengan sasaran dan indikator kinerja yang terdapat pada Renstra Dinas Kesehatan. Program dan kegiatan ini disusun dalam membuat anggaran yang menjadi komitmen kami untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat.

Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini. Semoga Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan untuk kepentingan masyarakat dan Negara.

Pangkalan Bun, 13 April 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

ACHMAD ROIS, SKM, M.Kes
NIP.19691104 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI.....ii

Bab I Pendahuluan..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum..... 2

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 3

 1.4 Sistematika Penyajian Laporan..... 4

Bab II Perencanaan Pembangunan

 2.1 Visi dan Misi..... 5

 2.2 Tujuan dan Sasaran..... 5

 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2023..... 5

Bab III Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja

 3.1 Capaian Kinerja Sasaran (tambahan penjelasan perbandingan target tahunan terhadap target akhir RENSTRA).....19

 3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan.....24

 3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan.....24

 3.4 Rekapitulasi Evaluasi Terhadap Rencana Kinerja Perangkat Daerah.....39

Bab IV Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

 4.1 Faktor Pendorong dan Penghambat.....72

 4.2 Tindak Lanjut Bagi Pelaksanaan Berikutnya.....73

Bab V Penutup

 5.1 Kesimpulan.....74

 5.2 Rekomendasi.....74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Dinas Kesehatan mempunyai arti yang Strategis dalam mendukung penyelenggaraan Program tahunan Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Rencana Kerja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Rencana Kerja Perangkat disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Perumusan rancangan akhir
- e. Penetapan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, telah dibentuk tim penyusun Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023. Tim yang dibentuk telah melakukan evaluasi yang meliputi realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi RKPD yang dilakukan bertujuan untuk melihat perkembangan hasil pelaksanaan RKPD dan keselarasan antara APBD dengan RKPD serta memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan kebijakan. Evaluasi RKPD triwulan I Tahun Anggaran 2023 didasarkan kepada pencapaian kinerja pembangunan sampai dengan kondisi 30 maret 2023. Sebagai dokumen evaluasi perencanaan pembangunan tahunan selama tahun berjalan, diharapkan hasil evaluasi ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2023 dan 2024.

Evaluasi terhadap hasil rencana kerja mencakup program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif. Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Evaluasi dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dilaksanakannya evaluasi hasil rencana kerja triwulan I tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
10. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor; 79 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Evaluasi hasil rencana kerja dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya tujuan dan sasaran renstra Dinas Kesehatan serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan Kabupaten

Kotawaringin Barat. Adapun tujuan dari Evaluasi hasil rencana kerja adalah :

1. Mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja
2. Mengetahui realisasi penyerapan dana
3. Mengetahui kendala yang dihadapi

1.4 SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN

Laporan evaluasi hasil rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan sistematika :

- BAB I : Pendahuluan, mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penyajian Laporan
- BAB II : Perencanaan Pembangunan, menjelaskan tentang visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, tujuan dan sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023.
- BAB III : Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja, menjelaskan tentang capaian kinerja sasaran, capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian target kinerja dan penyerapan dana program/kegiatan/sub kegiatan, rekapitulasi evaluasi terhadap rencana kerja perangkat daerah
- BAB IV : Faktor Pendorong dan Penghambat pencapaian kinerja, menjelaskan tentang faktor pendorong dan penghambat, serta tindak lanjut bagi pelaksanaan berikutnya
- BAB V : Penutup, menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2.1 VISI DAN MISI

Berdasarkan Visi, Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2006 -2025 Kabupaten Kotawaringin barat terdapat dua misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yaitu : Misi ke delapan (8) “ Mewujudkan derajat Kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan “ dan Misi ke 2 “ Mewujudkan Tata pemerintahan yang Baik”.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan.

Tujuan pembangunan kesehatan di Dinas Kesehatan sesuai dengan sasaran Pembangunan Daerah adalah meningkatnya kualitas pendidikan dan Kesehatan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan adalah Angka Harapan Hidup, dengan target di tahun 2026 angka harapan hidup mencapai usia 70,98 tahun.

2.Sasaran.

Sedangkan sasaran yang ditetapkan agar tujuan strategis dapat tercapai adalah:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat indikator yang digunakan :
 - a) Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup.
 - b) Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup.
 - c) Prevalensi Balita Stunting .
 - d) Insidensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk.
 - e) Insidensi HIV Per 100.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV.
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dibidang Kesehatan Indikator yang digunakan adalah Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan target disetiap tahunnya adalah 100%.
3. Meningkatnya kualitas layanan perangkat daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dengan target 100% di tahun 2026.

Tabel Indikator dan Target Tujuan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
Periode 2023-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja				Satuan
			2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan masyarakat.	Angka Harapan Hidup	70,74	70,82	70,9	70,98	Tahun
		1. Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran hidup	194	183	173	163	Per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)
		2. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	12,3	12,2	12,1	12,0	Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)
		3. Prevalensi Stunting	12,4	12,2	12,1	12,0	
		4. Insidensi Tubekulosis per 100.000 Penduduk	180	175	170	165	Per 100.000 penduduk
		5. Insidensi HIV Per 100.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV	0,18	0,18	0,18	0,18	Per 100.000 penduduk
	2.Terpenuhinya Kebutuhan dasar kesehatan masyarakat	Indeks Pencapaian SPM	100	100	100	100	
Meningkatnya Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatnya kualitas layanan Puskesmas dan Labkesda	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	85	86	87	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai sakip	B	BB	BB	A	

2.3 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pada tahun anggaran 2023 Dinas Kesehatan sebagaimana dimuat dalam DPA melaksanakan 5 program, 21 kegiatan dan 584 subkegiatan.

Tabel Target dan Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan
 Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan
1	2	3	4	5
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Pratama (kumulatif)	100	Persen
		Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	65	Persen
		Persentase Pustu/Poskesdes /Polindes yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	65	Persen
		Persentase pengadaan alat Kesehatan Rumah Sakit yang sesuai standar	100	Persen
		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan di Puskesmas melalui proses penyediaan, distribusi dan monev	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan balita	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan usia produktif	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut	100	Persen
		Persentase pelayanan Kesehatan orang penderita hipertensi	100	Persen
		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	Persen

		Persentase pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100	Persen
		Persentase pelayanan TB Paru	100	Persen
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan (HIV-AIDS)	100	Persen
		Persentase Desa/kelurahan UCI	100	Persen
		Persentase Desa/kelurahan yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dlm penanggulangan kedaruratan Kesehatan masyarakat yg berpotensi wabah	100	Persen
		Persentase pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	100	Persen
		Persentase Desa/Kelurahan mendukung Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	88	Persen
		Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	100	Persen
		Persentase peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah	90	Persen
A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya yang sesuai standar		
1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0	unit
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Kesehatan lainnya yang di bangun	1	unit
3	Pembangunan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	1	unit
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Gedung puskesmas yang direhabilitasi	1	unit
5	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	unit

6	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	unit
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	unit
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	unit
9	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	unit
10	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	Jenis
11	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan Puskesmas yang diadakan	208	paket
12	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	8	unit
13	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah dan jenis pengadaan bahan habis pakai	1	paket
14	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaan dan dikalibrasi	171	unit
B	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelayanan upaya kesehatan masyarakat	100	Persen
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.779	Bumil
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.562	Bulin

3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.403	Bayi baru lahir
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	21.875	Balita
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	48.716	Anak
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	180358	Orang
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	18.907	Lansia
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Usia produktif yang di Deteksi Dini /Skreening Hipertensi sesuai standar	53566	Orang
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Usia produktif yang di Deteksi Dini /Skreening Diabetes Mellitus sesuai standar	5591	orang
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yangb mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	421	Orang
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus TBC yang ditangani	503	Orang
		Jumlah penemuan kasus suspek teduga TBC	5030	Orang
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang diperiksa	6188	Orang
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV-AIDS	Jumlah Kasus HIV-AIDS yang di obati (ODHA ON ART)	338	Orang
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita yang mendapat penaganan gizi kurang dan gizi buruk	5	Dokumen
		Jumlah Puskesmas yang mendapat fasilitas penanganan gizi buruk	18	Puskesmas
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan dan monitoring evaluasi	18	Tempat
		Jumlah sosialisasi dan pembinaan GP2SP	8	Kegiatan
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengelola limbah medis dengan aman	20	Dokumen

		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan Monev program kesehatan lingkungan	5	Puskesmas
		Jumlah TPP dan TFU yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai standar	7	TPP /TFU
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat	2	Dokumen
		waktu penyediaan promosi kesehatan melalui media radio lokal	0	Kali /kegiatan
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18	Dokumen
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18	Dokumen
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1.125	Orang
20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0	Orang
21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	135	Orang
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	360	Dokumen
		Jumlah capaian pengobatan massal kecacingan	59.860	Anak
		jumlah deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	100	Bumil
23	pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	Paket
24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang tercover/ memiliki Jaminan Kesehatan	66271	jiwa
		Jumlah laporan hasil pengelolaan BPJS	12	Dokumen

25	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Usia produktif mendapatkan pelayanankesehatan Jiwa dan Napza di fasyankes dan sekolah	180.358	Orang
26	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan kota sehat	62	Desa /kelurahan
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	20	Dokumen
27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen
28	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18	Puskesmas
29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen
30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	18	Puskesmas
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pra akreditasi	3	Puskesmas
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pasca akreditasi	15	Puskesmas
31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah laporan SKDR yang dikirim tepat waktu	52	Dokumen
		Jumlah laporan SKDR yang dikirm dalam kurun waktu 1 tahun	52	Dokumen
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah jenis pemenuhan layanan peningkatan sistem informasi kesehatan		
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20	Dokumen
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	18	Unit
D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	100	%

1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasyankes yang dilakukan pemantauan, evaluasi dan bimbingan teknis	20	Unit
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah bidang PME diikuti	5	Bidang
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	Puskesmas
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti tahapan status BLUD	18	Puskesmas
3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Dokumen
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatkan pembinaan kesehatan rujukan	20	Puskesmas / Rujukan
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan izin praktik		Persen
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	Dokumen
2	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	250	Dokumen
B	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten /Kota	Waktu Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah Di Lingkup Dinas Kesehatan dan Jaringannya	75	%
1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	274	orang
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen

C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis layanan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	75	%
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	Orang
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT yang mendapatkan ijin	35	%
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50	dokumen
2	penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	45	sarana
3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	9	sarana
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertntu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan penerbitan izin produksi bagi industri rumah tangga	35 %	

1	pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	dokumen
2	pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	dokumen
3	pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	umlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	dokumen
4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	1	dokumen
C	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan pemeriksaan pada industri rumah tangga	35	%
1	Pemeriksaan postmarket pada produk makanan minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	unit
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	umlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50	Dokumen

A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	50	%
1	Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, Advokasi , kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	Dokumen
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1	Kegiatan
B	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	jumlah kegiatan promotif dan preventif yang diselenggarakan	50	%
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	16	Dokumen
C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan	50	%
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16	Dokumen
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	Dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA -SKPD yang disusun	1	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA -SKPD yang disusun	1	Dokumen
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	2	Dokumen
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	2	Dokumen

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4	Dokumen
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan		Kegiatan
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	100	%
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	589	ASN
2	Pelaksanaan penatausahaann dan pengujian / Verifikasi Keuanagan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verrifikasi keuangan SKPD	3000	Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	1	Laporan
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran yang disusun	13	Laporan
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola dengan baik	100	%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikat asset	16	Dokumen
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur		
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	Paket
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21	Paket
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan cetak dan penggandaan	1	Paket

6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18	Laporan
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	4	unit
2	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	laporan
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	2	laporan
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100	%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai	2	Unit
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	113	unit
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2	Unit
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12	unit
5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	unit

BAB III

EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA KERJA

Capaian kinerja sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat pada Triwulan I tahun 2023 dalam upaya meningkatkan angka harapan hidup sebagai tujuan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL CAPAIAN KINERJA SASARAN
(Bab III, 3.1)

NO	Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target	realisasi	Capaian (%)	Peringkat Kinerja
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	194	183,48	105	Sangat Tinggi
		Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	12,3	7,33	140	Sangat Tinggi
		Prevalensi Balita Stunting	12,4	4,2	195	Sangat Tinggi
		Insidensi Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	180	71,68	160	Sangat Tinggi
		Insidensi HIV Per 1.000 Penduduk yang Tidak Terinfeksi HIV	0,18	0,05	172	Sangat Tinggi
2	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat di bidang Kesehatan.	Indeks Pencapaian SPM	100	83,75	84,6	Tinggi

Berdasarkan tabel diatas dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 6 Indikator .Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

1 ANGKA KEMATIAN IBU (AKI).

Angka Kematian Ibu (AKI) pada triwulan I sebanyak 2 kasus kematian. Berdasarkan data dilapangan angka kelahiran hidup 1.090 jiwa. Penyebab kematian Ibu 1 orang disebabkan Hipertensi dan 1 penyakit lainnya karena perdarahan post Sectio Caesaria. Realisasi AKI pada januari – maret 183,48 / 100.000 KH dari target 194 / 100.000 KH atau capaian 105 %.

Upaya yang telah dilakukan adalah Deteksi Dini Ibu hamil di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes. Dengan Strategi Monitoring Ibu hamil dengan PWS KIA .

2. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB).

Angka Kematian Bayi (AKB) pad triwulan I sebanyak 8 kasus kematian . Berdasarkan data dilapangan angka kelahiran hidup sebanyak 1.090 jiwa. Penyebab kematian Bayi dilapangan terdiri dari 4 kasus BBLR, 2 Kasus Bayi dengn Asfiksia, 1 Kasus Kelainanan Kongenital dan 1 Kasus penyakit lainnya. Realisasi AKB mencapai 7,33 /1000 KH dari target 12,3 / 1.000 KH atau capaian 140 % . Upaya yang telah dilakukan adalah Deteksi Dini Ibu Hamil / Bayi di Fasilitas Kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes. Strategi dan upaya yang diharapkan adalah dengan meningkatkan kualitas kapasitas kompetensi Tenaga Kesehatan dengan Penyegaran ataupun bimbingan teknis dari Sumber yang Profesional.

3.PREVALENSI BALITA STUNTING.

Sasaran Balita yang diukur sebanyak 1.4610 balita dengan kasus stunting 619 balita. Untuk Realisasi persentase 4,2 % dari target 12,4 % dan dengan capaian kinerja 195 %. Penyebab terjadinya Stunting di nilai dari 1000 hari kehidupan pertama janin dalam tubuh ibu dengan pengaruh faktor genetik, gizi ibu serta lingkungan (konsumsi makanan sehat, kebersihan atau sanitasi lingkungan dan ketersediaan air bersih).

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan teknik dan manajemen dokter, bidan dan petugas puskesmas lainnya melalui workshop peningkatan kapasitas tatalaksana gizi buruk, sosialisasi dan koordinasi suplementasi gizi, penguatan dan pelaksanaan dalam pedoman gizi seimbang;
2. Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi kurang/buruk, bumil KEK.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya pembinaan kader 100 HPK, pemantauan, pertumbuhan, dan perkembangan bayi dan balita;
2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan lintas sector dalam pelaksanaan surveilans gizi.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya kader kesehatan gizi sebagai surveilans;
2. Tersediannya fasilitas kesehatan pendukung seperti posyandu balita di setiap desa/kecamatan;
3. Dukungan lintas sektor yang kuat terhadap program gizi untuk penurunan angka *stunting*.

4.INSIDENSI TUBERKOLOSIS

Kasus tuberkulosis adalah Pasien tuberkulosis yang terkonfirmasi bakteriologis, yaitu pasien tuberkulosis yang terbukti positif pada hasil pemeriksaan contoh uji biologinya (sputum dan jaringan) melalui pemeriksaan mikroskopis langsung, Tes Cepat Molekuler (TCM) tuberkulosis, atau biakan. Pasien tuberkulosis terdiagnosis secara klinis yaitu pasien yang tidak memenuhi kriteria terdiagnosis secara bakteriologis tetapi didiagnosis sebagai pasien tuberkulosis aktif oleh dokter, dan diputuskan untuk diberikan pengobatan tuberkulosis. Untuk Kasus Insidensi pada triwulan 1 terdapat 198 orang dari hasil penjarangan Suspek TBC.Dengan perbandingan jumlah penduduk .Realisasi dilapangan 71,68 % dari target 180 % dan mencapai 160 %. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan test Dahak. Rotgen Kepada orang yang tertsuspek atau terduga TBC. Hambatan dilapangan adalah kurang sadarnya atau ada keinginan dari masyarakat yang beresiko untuk memeriksakan diri ke fasilitas jkesehatan terdekat walaupun sudah bergejala TBC.Karena masih adanya Diskriminasi sosial terhadap penderita TBC di masyarakat dan merasa dikucilkan.Upaya yang terus dilakukan Tenaga kesehatan adalah meningkatkan penjarangan ke lapangan dan mensosialisasikan terhadap masyarakat untuk mendukung penyembuhan TBC terhadap masyarakat yang masih Awam terhadap TBC,.

5.INSIDENSI HIV

Penyakit HIV disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV, sesuai dengan nama penyakitnya. Bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah

Untuk Kasus Insidensi pada triwulan 1 terdapat 5 orang dari hasil penjarangan usia diatas 15 tahun.Dengan perbandingan jumlah penduduk yang berusia diatas 15 tahun di periksa dengan RDT HIV pada kelompok Populasi masyarakat resiko.Dengan realisasi angka 0.05 % dari target 0,18 % serta capaian 172 %.Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan / test HIV di kelompok populasi masyarakat beresiko.

Adapun analisis tercapainya kinerja adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembekalan pelatihan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM tenaga kesehatan;
2. Peningkatan skrining HIV pada masyarakat beresiko, skrining wajib bagi ibu hamil, populasi kunci LSL (Laki Seks Lelaki) meningkat, WPS (Wanita Pekerja Seksual) masih aktif dan menyebar di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Dukungan pemerintah beserta LSM dalam program penanggulangan HIV/AIDS.

Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Kerjasama antara KPA, LSM dan Dinas Kesehatan untuk melakukan proses pendampingan terhadap orang terinfeksi HIV;
2. Terlaksananya skrining sebagai deteksi dini HIV.

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan analisa sebagai berikut:

1. Tersedianya regulasi peraturan pemerintah yang telah dimanfaatkan untuk meningkatkan kesesuaian visi dan misi dalam pengendalian kasus HIV;

2. tersedianya kualitas SDM dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi/aplikasi;
3. Tersedianya alat pemeriksaan untuk skrining melalui program *mobile* VCT;
4. Adanya peran lintas sektor dan penjangkau untuk melakukan kegiatan atau penjangkauan pada populasi berisiko, ketersediaan logistik yang memadai juga mendukung dalam pencapaian program,

3.2 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan

Untuk sasaran strategis yang ke 2 (dua) Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Masyarakat di bidang Kesehatan.Indeks Pencapaian SPM.

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SASARAN 2023	Satuan	TERLAYAN I (ORANG)	CAPAIAN TW I (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	4.779	Orang	1103	23,08%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan	4.562	Orang	1.064	23,32%
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.403	Orang	997	22,64%
4	Pelayanan Kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan	21.875	Orang	5.686	25,99%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	48.716	Orang	33.677	69,13%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah usia produktif yang mendapat pelayanan sesuai standar	180.358	Orang	31.822	17,64%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	18.907	Orang	5.686	30,07%
8	Pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	53.566	Orang	10.637	19,86%
9	Pelayanan kesehatan pada penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	5.591	Orang	2.596	46,43%
10	Pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	421	Orang	307	72,92%
11	Pelayanan kesehatan pada orang dengan Tuberkolosis (TB)	Jumlah penemuan kasus suspek teduga TBC	5.030	Orang	1.355	26,94%
12	Pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV -AIDS	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV - AIDS yang diperiksa	6.113	Orang	1940	31,74%
13	Vaksinasi COVID -19	jumlah orang yang beresiko terpapar COVID-19	230.601	Orang		0,00%
			DOSIS 1	orang	226.234	98,11%
			DOSIS 2	orang	202.439	87,79%
			DOSIS 3	orang	81.350	45,94%
			DOSIS 4	orang	2.156	1,22%

TABEL 3.3 Capaian Target Kinerja dan Penyerapan Dana Program /Kegiatan

KODE			BELANJA APBD				Sisa Anggaran
	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEG	PAGU APBD (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (SPJ Proses + SPJ Cair)	REAL FISIK %	
			Rp	%			
1	2	3=4+8+12+16	20=5+9+13+17	21=(20/3)*100		22=7+11+15+19	
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Rp115.436.605.348	Rp 16.174.892.795,00	14,01	Rp10.097.663.427,00	8,75	Rp 99.261.712.553,00
1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 57.261.085.930	Rp 8.385.754.539,00	14,64	Rp 8.287.241.242,00	14,47	Rp 48.875.331.391,00
1 02 01 2,01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 220.605.426	Rp 50.227.100,00	22,77	Rp 81.018.500,00	36,73	Rp 170.378.326,00
1 02 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 166.200.576	Rp 50.227.100,00	30,22	Rp 73.346.000,00	44,13	Rp 115.973.476,00
1 02 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 10.865.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 10.865.000,00
1 02 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Rp 10.865.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 10.865.000,00
1 02 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 7.672.500	Rp -	0,00	Rp 7.672.500,00	100,00	Rp 7.672.500,00
1 02 01 2.01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 7.672.500	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 7.672.500,00
1 02 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 5.449.850	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 5.449.850,00

1	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 11.880.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 11.880.000,00
1	02	01	2,02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 55.516.030.800	Rp 8.142.768.073,00	14,67	Rp 8.142.768.073,00	14,67	Rp 47.373.262.727,00
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 54.969.212.000	Rp 8.004.821.639,00	14,56	Rp 8.004.821.639,00	14,56	Rp 46.964.390.361,00
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 414.793.700	Rp 69.482.980,00	16,75	Rp 69.482.980,00	16,75	Rp 345.310.720,00
1	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 129.025.000	Rp 68.463.454,00	53,06	Rp 68.463.454,00	53,06	Rp 60.561.546,00
1	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 3.000.100	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 3.000.100,00
1	02	01	2,03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp 43.304.434	Rp 986.000,00	2,28	Rp -	0,00	Rp 42.318.434,00
1	02	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp 43.304.434	Rp 986.000,00	2,28	Rp -	0,00	Rp 42.318.434,00
1	02	01	2,05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 83.575.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 83.575.000,00
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 54.945.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 54.945.000,00
1	02	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 28.630.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 28.630.000,00
1	02	01	2,06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 407.881.109	Rp 34.697.505,00	8,51	Rp 2.650.000,00	0,65	Rp 373.183.604,00

1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 10.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 10.000.000,00
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 79.998.608	Rp -	0,00	Rp 1.500.000,00	1,88	Rp 79.998.608,00
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 14.931.853	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 14.931.853,00
1	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 5.437.435	Rp -	0,00	Rp 150.000,00	2,76	Rp 5.437.435,00
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 79.998.213	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 79.998.213,00
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 217.515.000	Rp 34.697.505,00	15,95	Rp 1.000.000,00	0,46	Rp 182.817.495,00
1	02	01	2,07		Kegiatan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 48.469.094	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 48.469.094,00
1	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Rp 47.368.728	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 47.368.728,00
1	02	01	2.07	06	Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 1.100.366	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 1.100.366,00
1	02	01	2,08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 815.256.881	Rp 157.075.861,00	19,27	Rp 60.804.669,00	7,46	Rp 658.181.020,00
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 559.575.081	Rp 110.839.941,00	19,81	Rp 40.076.669,00	7,16	Rp 448.735.140,00
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 255.681.800	Rp 46.235.920,00	18,08	Rp 20.728.000,00	8,11	Rp 209.445.880,00
1	02	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 125.963.186	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 125.963.186,00

1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp 19.640.500	Rp -	#ERROR!	Rp -	0,00	Rp 19.640.500,00
1	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 35.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 35.000.000,00
1	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 46.340.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 46.340.000,00
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 15.000.000,00
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 9.982.686	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 9.982.686,00
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 47.516.823.918	Rp 5.963.606.836,00	12,55	Rp 994.646.635,00	2,09	Rp 41.553.217.082,00
1	02	02	2.01		Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10.525.060.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 10.525.060.000,00
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Rp 180.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 180.000.000,00
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 400.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 400.000.000,00
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Rp 1.825.000.000					Rp 1.825.000.000,00

1	02	02	2.01	07	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 1.095.000.000						Rp 1.095.000.000,00
1	02	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas (Dinas Kesehatan)	Rp 120.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 120.000.000,00
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya (Dinas Kesehatan)	Rp 1.435.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 1.435.000.000,00
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Rp 100.000.000						Rp 100.000.000,00
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 50.000.000						Rp 50.000.000,00
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 715.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 715.000.000,00
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 4.425.060.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 4.425.060.000,00
1	02	02	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 80.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 80.000.000,00
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Dinas Kesehatan)	Rp 100.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 100.000.000,00
1	02	02	2,02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36.706.264.344	Rp 5.963.606.836,00	16,25	Rp 994.646.635,00	2,71		Rp 30.742.657.508,00

1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp 19.990.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 19.990.000,00
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Rp 4.421.698.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 4.421.698.000,00
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Balu Lahir	Rp 9.922.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 9.922.000,00
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp 41.974.266	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 41.974.266,00
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 15.000.000,00
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Rp 14.820.000		0,00		0,00	Rp 14.820.000,00
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Rp 39.991.290	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 39.991.290,00
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Rp 29.997.440	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 29.997.440,00
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 9.980.000	Rp -	0,00	Rp 3.730.000,00	37,37	Rp 9.980.000,00
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Rp 34.981.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 34.981.000,00
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Rp 14.572.000	Rp -	0,00	Rp 8.800.000,00	60,39	Rp 14.572.000,00
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Rp 79.999.800	Rp -	0,00	Rp 11.236.000,00	14,05	Rp 79.999.800,00
1	1	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -

1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 40.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 40.000.000,00
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 9.999.850	Rp 5.130.000,00	51,30	Rp 1.086.000,00	10,86	Rp 4.869.850,00
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 24.999.450	Rp 3.634.000,00	14,54	Rp 986.000,00	3,94	Rp 21.365.450,00
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp 20.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 20.000.000,00
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Rp 29.998.369	Rp -	0,00	Rp 4.964.000,00	16,55	Rp 29.998.369,00
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 14.999.750	Rp 5.925.000,00	39,50	Rp 13.651.165,00	91,01	Rp 9.074.750,00
1	02	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Rp -	Rp -	#DIV/0!	Rp -	#DIV/0!	Rp -
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Rp 50.219.000	Rp -	0,00	Rp 22.459.000,00	44,72	Rp 50.219.000,00
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 149.999.750	Rp 9.400.000,00	6,27	Rp 16.212.000,00	10,81	Rp 140.599.750,00
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 23.697.625.000	Rp 4.950.967.000,00	20,89	Rp 853.708.900,00	3,60	Rp 18.746.658.000,00
1	02	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Rp 9.999.800	Rp 567.000,00	5,67	Rp 5.799.800,00	58,00	Rp 9.432.800,00
1	02	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Rp 20.000.150	Rp -	0,00	Rp 1.972.000,00	9,86	Rp 20.000.150,00

1	02	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Rp 2.352.477.403	Rp 299.190.440,00	12,72	Rp 30.490.190,00	1,30	Rp 2.053.286.963,00
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Rp 5.492.598.326	Rp 687.505.396,00	12,52	Rp -	0,00	Rp 4.805.092.930,00
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 5.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 5.000.000,00
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Rp 25.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 25.000.000,00
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Rp 14.999.700	Rp 1.288.000,00	8,59	Rp 14.311.580,00	95,41	Rp 13.711.700,00
1	02	02	2.02	40	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Rp 15.422.000					Rp 15.422.000,00
1	02	02	2,03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Rp 205.441.624	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 205.441.624,00
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Rp 14.967.700	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 14.967.700,00
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 14.974.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 14.974.000,00
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet (Dinas Kesehatan)	Rp 175.499.924	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 175.499.924,00
1	02	02	2,04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 80.057.950	Rp -	0,00	Rp -	0,00	Rp 80.057.950,00

1	02	02	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Rp	9.999.950							Rp	9.999.950,00
1	02	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	-	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-	#DIV/0!	Rp	-
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp	40.000.000	Rp	-	0,00	Rp	-	0,00	Rp	40.000.000,00
1	02	02	2.04	04	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rp	30.058.000	Rp	-	0,00	Rp	-	0,00	Rp	30.058.000,00
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp	10.068.270.400	Rp	1.825.531.420,00	18,13	Rp	799.149.550,00	7,94	Rp	8.242.738.980,00
1	02	03	2,01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	20.000.000	Rp	-	0,00	Rp	1.098.000,00	5,49	Rp	20.000.000,00
1	02	03	2.01	1	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp	10.000.000							Rp	10.000.000,00
1	02	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp	10.000.000	Rp	-	0,00	Rp	1.098.000,00	10,98	Rp	10.000.000,00
1	02	03	2,02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	9.948.270.400	Rp	1.825.531.420,00	18,35	Rp	798.051.550,00	8,02	Rp	8.122.738.980,00

1	02	03	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 10.000.000						Rp 10.000.000,00
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rp 9.923.270.400	Rp 1.825.531.420,00	18,40	Rp 792.051.550,00	7,98		Rp 8.097.738.980,00
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	Rp 6.000.000,00	40,00		Rp 15.000.000,00
1	02	03	2,03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 100.000.000,00
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.000.000	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 100.000.000,00
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 458.975.000	Rp -	0,00	Rp 10.689.000,00	2,33		Rp 458.975.000,00
1	02	04	2,01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp 126.619.680	Rp -	0,00	Rp -	0,00		Rp 126.619.680,00

1	02	04	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	106.619.680							Rp	106.619.680,00		
1	02	04	2.01	2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) (Dinas Kesehatan)	Rp	5.000.000	Rp	-	0,00	Rp	-	0,00		Rp	5.000.000,00	
1	02	04	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	15.000.000								Rp	15.000.000,00	
1	02	04	2,02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp	11.000.000									Rp	11.000.000,00

1	02	04	2,02	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1	Rp	5.000.000						Rp	5.000.000,00	
1	02	04	2,02	2	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Rp	6.000.000						Rp	6.000.000,00	
1	02	04	2,03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	136.344.610	Rp	-	0,00	Rp	5.008.000,00	3,67	Rp	136.344.610,00
1	02	04	2,03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	136.344.610	Rp	-	0,00	Rp	5.008.000,00	3,67	Rp	136.344.610,00

1	2	5				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 131.450.100	Rp -	0,00	Rp 5.937.000,00	4,52	Rp 131.450.100,00
1	2	5	2,01			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 86.450.000	Rp -	0,00	Rp 1.098.000,00	1,27	Rp 86.450.000,00
1	02	05	2.01	01		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Rp 86.450.000	Rp -	0,00	Rp 1.098.000,00	1,27	Rp 86.450.000,00
1	2	5	2,02			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30.000.100	Rp -	0,00	Rp 1.086.000,00	3,62	Rp 30.000.100,00
1	02	05	2.02	01		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Rp 30.000.100	Rp -	0,00	Rp 1.086.000,00	3,62	Rp 30.000.100,00
1	2	5	2,03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	Rp 3.753.000,00	25,02	Rp 15.000.000,00
1	02	05	2.03	01		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Rp 15.000.000	Rp -	0,00	Rp 3.753.000,00	25,02	Rp 15.000.000,00

TABEL 3.4 REALISASI CAPAIAN KINERJA

No.	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Subkegiatan	Target Kinerja Tahun 2023	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Sampai dengan Tahun 2023			
							Hambatan	Solusi	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Rumah Sakit Pratama (kumulatif)	100	Persen					
		Persentase Puskesmas yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	65	Persen					
		Persentase Pustu/Poskesdes /Polindes yang memiliki jumlah dan jenis alat Kesehatan sesuai standar	65	Persen					
		Persentase pengadaan alat Kesehatan Rumah Sakit yang sesuai standar	100	Persen					

		Persentase ketersediaan obat dan perbekalan Kesehatan di Puskesmas melalui proses penyediaan, distribusi dan monev	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan balita	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan usia Pendidikan dasar	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan usia produktif	100	Persen					
		Persentase pelayanan kesehatan usia lanjut	100	Persen					
		Persentase pelayanan Kesehatan orang penderita hipertensi	100	Persen					

		Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	Persen					
		Persentase pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	100	Persen					
		Persentase pelayanan TB Paru	100	Persen					
		Persentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan (HIV-AIDS)	100	Persen					
		Persentase Desa/kelurahan UCI	100	Persen	47%	47%	Belum meratanya Desa UCI	Melakukan sweeping imunisasi bagi bayi yang tidal lengkap Imunisasi Dasarnya	Dari 94 Desa/Kelurahan ada 44Desa yang memenuhi tsrget IDL untuk TW 1 Tahun 2023

		Persentase Desa/kelurahan yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dlm penanggulangan kedaruratan Kesehatan masyarakat yg berpotensi wabah	100	Persen					
		Persentase pelayanan Kesehatan dasar masyarakat miskin	100	Persen					
		Persentase Desa/Kelurahan mendukung Penyelenggaraan Kabupaten /Kota Sehat	88	Persen					
		Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan sesuai standar	100	Persen					
		Persentase peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah	90	Persen					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							

A	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Puskesmas dan jaringannya yang sesuai standar							
1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	0	unit					
2	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Gedung Kesehatan lasinnya yang di bangun	1	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaaan	dilaksanakan pada triwulan II dan III	
3	Pembangunan rumah dinas Tenaga kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga Kesehatan yang dibangun	1	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaaan	dilaksanakan pada triwulan II	
4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Gedung puskesmas yang direhabilitasi	1	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaaan	dilaksanakan pada triwulan II	
5	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	9	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaaan	dilaksanakan pada triwulan II dan III	

6	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	10	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaan	dilaksanakan pada triwulan II dan III	
7	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	jumlah Sarana . Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	12	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaan	dilaksanakan pada triwulan II dan III	
8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	umlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1	unit	0	0%	dalam Proses Evaluasi Perencanaan	dilaksanakan pada triwulan II	
9	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	umlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	unit	0	0%		dilaksanakan pada triwulan II	
10	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	6	Jenis	0	0%		dilaksanakan pada triwulan II dan III	

1 1	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat Kesehatan/a lat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang diadakan Puskesmas yang diadakan	208	paket					
1 2	Pemeliharaa n Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemelihara an	8	unit	0	0%		dilaksanakan pada triwulan II	
1 3	Pengadaan bahan habis pakai	Jumlah dan jenis pengadaan bahan habis pakai		paket					
1 4	Pemeliharaa n Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan yang dilakukan pemeliharaa n dan dikalibrasi	171	unit					
B	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Kewenanga n Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pelayanan upaya kesehatan masyarakat							
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatka n pelayanan kesehatan	4.77 9	Bumil	1.10 3	23,0 8			

2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.562	Bulin	1.064	23,32			
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	4.403	Bayi baru lahir	997	22,64			
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	21.875	Balita	5.686	25,99			
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia dasar yang mendapat pelayanan kesehatan	48.716	Anak	33.677	69,13			
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	180358	Orang	31822	17,64			
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standar	18.907	Lansia	5.686	30,07			
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Usia produktif yang di Deteksi Dini /Skreening Hipertensi sesuai standar	53566	Orang	10637	19,86%			

9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Usia produktif yang di Deteksi Dini /Skreening Diabetes Mellitus sesuai standar	5591	orang	2596	46,43			
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yangb mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	421	Orang	307	72,92			
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah kasus TBC yang ditangani	503	Orang	198	39,38			
		Jumlah penemuan kasus suspek teduga TBC	5030	Orang	1355	26,94			
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang diperiksa	6188	Orang	1940	31,35			
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan HIV-AIDS	Jumlah Kasus HIV-AIDS yang di obati (ODHA ON ART)	338	Orang	158	46,74			
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita yang mendapat penaganan gizi kurang dan gizi	5	Doku men					

		buruk							
		Jumlah Puskesmas yang mendapat fasilitas penanganan gizi buruk		Puskesmas					
14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang dilakukan pembinaan dan monitoring evaluasi	18	Tempat	4	33,33	Kurangnya kesadaran para pekerja untuk datang ke POS UKK	Melaksanakan sosialisasi kepada para pekerja pentingnya datang ke POS UKK supaya bisa terdeteksi kemungkinan penyakit tidak menular dan penyakit degeneratif	Bekerjasama dengan Puskesmas dan Lintas Sektor Terkait dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan di POS UKK
		Jumlah sosialisasi dan pembinaan GP2SP	8	Kegiatan	2	25,00%			
15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengelola limbah medis dengan aman	20	Dokumen					
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pembinaan dan Monev program kesehatan lingkungan	5	Puskesmas	3	60	-	-	

		Jumlah TPP dan TFU yang dilakukan pembinaan dan pengawasan sesuai standar	7	TPP /TFU	4	57,14			
16	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	jumlah media promosi dan informasi sadar hidup sehat	2	Dokumen					
		waktu penyediaan promosi kesehatan melalui media radio lokal		Kali /kegiatan					
17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	18	Dokumen	18	18			
18	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	18	Dokumen					
19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang					

20	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		Dokumen					
21	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan	135	Orang					
22	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	360	Dokumen					
		Jumlah capaian pengobatan massal kecacingan		Anak					
		jumlah deteksi dini hepatitis B pada ibu hamil	100	Bumil	1024	18,32	Ibu Hamil K 1 tdk semuanya diperiksa di Puskesmas , krn sebgian diperiksa di Klinik Swasta/RSSwasta	Kerjasama dgn klinik/RSSwasta/Jejaring didrop Logistik RDT HBSaG	

2 3	pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	20	Paket	2	10	Rendahnya temuan tersangka kasus Campak dan AFP dan Mekanisme Pengiriman spesimen Varian COVID-19	Membuat Kesepakatan Target Pelacakan Kasus Suspek Campak dan AFP di puskesmas	
2 4	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk yang tercover/ memiliki Jaminan Kesehatan	662 71	jiwa	63.3 78	63.3 78			
		Jumlah laporan hasil pengelolaan BPJS	12	Dokumen	3	3			
2 5	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan Jiwa dan Napza di fasyankes dan sekolah		Orang					
2 6	Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan kota sehat		Desa /kelurahan					
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat	20	Dokumen					
2 7	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah	1	Dokumen					

		Sakit							
28	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	18	Puskesmas					
29	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen					
30	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/ Kota	18	Puskesmas					
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pra akreditasi		Puskesmas					
		Jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan pasca akreditasi		Puskesmas					
31	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah laporan SKDR yang dikirim tepat waktu	52	Dokumen	13	25.64	Hilangnya Sinyal Seluler Pada Unit Pelapor, saat waktu pengiriman Laporan di hari Senin dan Selasa Setiap Minggunya	Identifikasi Unit Pelapor yang mengalami masalah Sinyal seluler	TW I. Tercapai

		Jumlah laporan SKDR yang dikirim dalam kurun waktu 1 tahun	52	Dokumen	13	26.92			TW I. Tercapai
C	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Jumlah jenis pemenuhan layanan peningkatan sistem informasi kesehatan							
1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	20	Dokumen					
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen					
3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	18	Unit					
D	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan penerbitan izin fasilitas pelayanan kesehatan	100	%					

1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah fasyankes yang dilakukan pemantauan , evaluasi dan bimbingan teknis	20	Unit					
2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah bidang PME diikuti	5	Bidan g					
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	18	Puske smas					
		Jumlah Puskesmas yang mengikuti tahapan status BLUD	18	Puske smas					
3	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaa n Pelayanan Kesehatan Rujukan	1	Doku men					
		Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit mendapatka n pembinaan kesehatan rujukan	20	Puske smas / Rujuk an	4	20% %			TW 1 Tercapai

		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
A	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten /Kota	Persentase tenaga kesehatan yang diberikan ijin praktik		Persen					
1	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan sesuai standar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	7	Doku men					
2	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	250	Doku men					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
B	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM	Waktu Penyediaan Honor Tenaga Kontrak Daerah Di Lingkup Dinas Kesehatan dan	75	%					

	di Wilayah Kabupaten /Kota	Jaringannya							
1	Perencanaaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen					
2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	274	orang					
3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							

C	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah jenis layanan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan	75	%					
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	30	Orang					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
A	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT yang mendapatkan ijin	35	%	9				

1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50	dokumen	14				
2	penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	45	sarana	14				

3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen lain Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatari, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Komitmen Izin	9	sarana					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
B	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertntu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan penerbitan izin produksi bagi industri rumah tangga	35 %						

1	pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	jumlah Dokumen Pengendalia n dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	doku men					
2	pengendalia n dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalia n dan Pengawasa n serta Tindak Lanjut Pengawasa n Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	1	doku men					

3	pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1	dokumen					
4	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air	1	dokumen					

		Minum (DAM)							
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
C	Pemeriksaa n dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaa n Post Market pada Produksi dan Produk makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Jumlah jenis layanan pemeriksaa n pada industri rumah tangga	35	%					

1	Pemeriksaan postmarket pada produk makanan-minuman industri rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		unit					
2	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga	umlah Data Perizinan Industri Rumah Tangga yang Dikelola dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan		Dokumen					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
A	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan	50	%					

1	Peningkatan Upaya Promosi kesehatan, Advokasi , kemitraan dan pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	9	Dokumen					
		Jumlah Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Kegiatan					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
B	Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	jumlah kegiatan promotif dan preventif yang diselenggarakan	50	%					
1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	16	Dokumen					
		Rata-Rata capaian Kinerja							

		(%)							
		Predikat Kinerja							
C	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah layanan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan	50	%					
1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	16	Dokumen					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
A	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100	%					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	8	Dokumen					

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang disusun	1	Dokumen					
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD yang disusun	1	Dokumen					
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang disusun	2	Dokumen					
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD yang disusun	2	Dokumen					
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan					
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	4	Dokumen					
		Jumlah kegiatan evaluasi kinerja yang dilaksanakan		Kegiatan					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							

B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan	100	%					
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	589	ASN					
2	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuanagan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verrifikasi keuangan SKPD	3000	Dokumen					
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun		Laporan					
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/ Semesteran yang disusun	13	Laporan					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola	100	%					

	Daerah	dengan baik							
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen sertifikat asset	16	Dokumen					
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan peningkatan disiplin aparatur							
1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	%					
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	Paket					
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	7	Paket					

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis penyediaan peralatan rumah tangga	21	Paket					
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	Paket					
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu penyediaan cetak dan penggandaan	1	Paket					
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	18	Laporan					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100	Persen					
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin lainnya	4	unit					
2	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	Unit					

		disediakan							
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan adminstrasi perkantoran	100	%					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyedia jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	12	laporan					
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	2	laporan					
		Rata-Rata capaian Kinerja (%)							
		Predikat Kinerja							
H	Pemeliharaaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang dipelihara	100	%					
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang layak pakai	2	Unit					

2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	113	unit					
3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diperbaiki	2	Unit					
4	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	12	unit					
5	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara	1	unit					

BAB IV

FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA

Berdasarkan capaian indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan hingga triwulan I faktor pendorong dan penghambat pencapaian target adalah :

4.1 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT.

1. Faktor Pendorong

- a. Tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta di seluruh kecamatan dan desa/kelurahan
- b. Tersedianya Tenaga Kontrak Daerah dalam jumlah yang cukup di Puskesmas dan jaringannya.
- c. Tersedianya alokasi dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-fisik.
- d. Tersedianya kader kesehatan di seluruh Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.
- e. Dukungan lintas sektor cukup memberikan kontribusi.

2. Faktor Penghambat

- a. Kemampuan teknis dan manajemen sumberdaya manusia (SDM) kesehatan di Puskesmas dan jaringannya belum merata.
- b. Masih terdapat Puskesmas dengan peralatan kesehatan yang belum memenuhi standar
- c. Rendahnya minat tenaga kesehatan khususnya dokter gigi bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah terpencil
- d. Terlambatnya pengesahan SK PPTK

4.2 TINDAK LANJUT BAGI PELAKSANAAN BERIKUTNYA

Tindak lanjut yang dapat diambil untuk meningkatkan pencapaian target di tahun 2023 antara lain :

- a. Menindaklanjuti rekomendasi Audit Maternal Perinatal untuk penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Neonatus
- b. Meningkatkan pembinaan Posyandu Mandiri dan UKBM Lainnya
- c. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan pembinaan teknis program ke Puskesmas.
- d. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam komunikasi, koordinasi dan pelaporan dari Puskesmas
- e. Memaksimalkan penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan untuk pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- f. Meningkatkan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan
- g. Mempertahankan keberadaan Tenaga Kontrak Daerah
- h. Mengaktifkan kunjungan rumah dengan protokol kesehatan ketat
- i. Melaksanakan pengadaan alat kesehatan di beberapa puskesmas
- j. Penataan sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

- a. Sasaran strategis untuk tahun 2023, mengikuti Renstra 2023 -2026 dengan penyesuaian RPD Kabupaten Kotawaringin Barat di bidang Kesehatan. Yakni :
 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan meliputi Angka Kematian Ibu per 100.000 KH, Angka Kematian Bayi per 1.000 KH, Prevalensi Balita Stunting, Insidensi TB per 100.000 penduduk, Insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV.
 2. Terpenuhinya Kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan meliputi Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Masyarakat (SPM).
- b. Indikator sasaran yang memenuhi target triwulan I (berada dalam jalur pemenuhan target tahunan) .

5.2 REKOMENDASI

Untuk meningkatkan cakupan pemenuhan indikator sasaran sesuai target beberapa hal yang perlu dilakukan adalah :

1. Meningkatkan pemantauan bayi baru lahir dengan risiko tinggi sejak berada didalam kandungan.
2. Meningkatkan kemampuan teknis penanganan kegawatdaruratan bayi baru lahir bagi tenaga Puskesmas.
3. Meningkatkan Deteksi Dini kepada Ibu hamil yang beresiko di tingkat fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Poskesdes.
4. Meningkatkan kepatuhan terhadap SOP Rujukan
5. Meningkatkan ketersediaan peralatan kesehatan sesuai standar di Puskesmas
6. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran kas.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.